

PERAN PERPUSTAKAAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KOTA BANJARMASIN

Oleh :

Devia Hetty Hernany¹⁾, Beni Akhmad²⁾, Amelia Puspita³⁾, Hairansyah⁴⁾

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
email: deviahettyh@uniska-bjm.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 30 Juli 2026

Revisi, 13 September 2026

Diterima, 14 September 2026

Publish, 15 September 2026

Kata Kunci :

Perpustakaan Daerah,
Literasi,
Pelayanan Publik.



ABSTRAK

Studi ini dilakukan untuk menelaah peran Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin dalam menunjang pembangunan sumber daya manusia (SDM), memetakan bentuk layanan dan program literasinya, mengungkap faktor pendukung serta penghambatnya, dan merumuskan strategi penguatan perannya ke depan. Pendekatan kualitatif bertipe deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan data dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap Kepala Perpustakaan Daerah, pustakawan, pengunjung, dan peserta program literasi, kemudian dianalisis lewat tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin telah menjalankan fungsinya sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, tercermin dari layanan baca di tempat, peminjaman koleksi, perpustakaan digital, serta program literasi seperti pelatihan literasi digital, mendongeng, dan bedah buku. Faktor pendukung utamanya mencakup dukungan pemerintah daerah, kompetensi pustakawan, serta kemitraan dengan sekolah dan komunitas literasi. Sementara itu, kendala yang masih dijumpai antara lain rendahnya minat baca sebagian warga, keterbatasan anggaran dan sarana teknologi, serta sosialisasi layanan yang belum menyeluruh. Strategi penguatan peran perpustakaan ke depan diarahkan pada perluasan kemitraan, pengembangan koleksi digital, dan penajaman promosi layanan melalui media sosial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Devia Hetty Hernany

Afiliasi: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Email: deviahettyh@uniska-bjm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya, karena dari sanalah kesiapan masyarakat menghadapi tantangan global, arus perkembangan teknologi, serta perubahan sosial-ekonomi yang kian rumit dapat terbentuk. Di titik inilah keberadaan perpustakaan menemukan relevansinya, yakni sebagai simpul informasi, gudang pengetahuan, sekaligus wahana belajar yang berlangsung sepanjang hayat (lifelong learning). Fungsinya kini bergeser jauh dari sekadar gudang penyimpanan buku menuju pusat aktivitas literasi

yang berkontribusi memperkuat daya pikir masyarakat (Sulistyo-Basuki, 2010).

Selaku institusi pelayanan publik, perpustakaan daerah mengemban kewajiban memastikan akses informasi terbuka secara merata bagi seluruh kelompok masyarakat (Sutarno NS, 2012). Amanat ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menempatkan fungsi pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi sebagai jalan untuk mencerdaskan sekaligus memberdayakan warga. Keberhasilan peran tersebut dapat diukur antara lain melalui tingkat literasi, yaitu kesanggupan seseorang mengenali, memaknai, dan memanfaatkan

informasi secara tepat guna (UNESCO, 2017); sementara IFLA (2015) memandang perpustakaan sebagai ruang belajar tanpa batas waktu sekaligus instrumen pemberdayaan komunitas.

Sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Selatan, Banjarmasin tumbuh dengan laju sosial-ekonomi yang cukup dinamis, sehingga penguatan infrastruktur pendidikan dan literasi—termasuk pengembangan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin—menjadi agenda prioritas pemerintah setempat. Kendati demikian, upaya mengoptimalkan peran perpustakaan daerah tersebut belum lepas dari berbagai kendala, mulai dari lemahnya minat baca warga, layanan yang belum termanfaatkan secara maksimal, minimnya program literasi yang inovatif, hingga keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi. Pergeseran cara masyarakat mengakses informasi akibat pesatnya teknologi digital juga menuntut perpustakaan untuk terus berinovasi—tidak lagi cukup mengandalkan koleksi cetak, tetapi harus pula menyediakan akses ke sumber informasi digital yang sesuai kebutuhan zaman.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk: (1) menelaah peran Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin dalam menunjang pembangunan sumber daya manusia; (2) memetakan ragam layanan dan program yang turut mendorong peningkatan literasi warga; (3) mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat optimalisasi peran perpustakaan daerah; dan (4) menyusun strategi guna memperkuat peran perpustakaan daerah dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Banjarmasin.

KAJIAN TEORI

Konsep Perpustakaan dan Perpustakaan Daerah

Sebagai institusi penyedia informasi, perpustakaan menempati posisi strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Sulistyono-Basuki (2010) memandangnya sebagai unit kerja yang menjalankan fungsi menghimpun, mengolah, menyimpan, hingga menyebarluaskan bahan pustaka kepada penggunanya, baik untuk keperluan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, maupun rekreasi intelektual. Cara pandang ini menegaskan bahwa keberadaan perpustakaan jauh melampaui fungsi penyimpanan koleksi buku semata—ia adalah pusat informasi dan ruang belajar yang terbuka bagi siapa pun. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang mendudukan perpustakaan sebagai pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional melalui sistem baku demi memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya.

Lebih spesifik lagi, perpustakaan daerah adalah perpustakaan umum yang dikelola pemerintah setempat untuk memenuhi kebutuhan informasi warga pada cakupan wilayah tertentu (Sutarno NS,

2012). Kehadirannya krusial sebab berperan sebagai jalur pendidikan nonformal yang terbuka bagi siapa saja tanpa memandang usia, jenjang pendidikan, ataupun status sosial. Selain menyediakan sumber informasi yang sesuai kebutuhan warga, perpustakaan daerah juga mengemban peran sebagai ruang literasi, misalnya melalui kegiatan membaca bersama, pelatihan literasi informasi, hingga diskusi buku.

Konsep Literasi dan Budaya Membaca

Secara sederhana, literasi dapat dipahami sebagai kesanggupan seseorang memahami, mengolah, dan mendayagunakan informasi secara efektif dalam kehidupan kesehariannya. UNESCO (2017) merumuskannya secara lebih luas, yakni kemampuan mengenali, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengomunikasikan, sekaligus menggunakan informasi pada berbagai konteks kehidupan. Karena berkaitan erat dengan kesanggupan individu mengakses pengetahuan secara kritis, literasi kerap dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Wujud konkret dari literasi itu sendiri dapat dilihat dari budaya membaca, yakni kebiasaan masyarakat menjadikan aktivitas membaca sebagai bagian rutin kesehariannya. Kian kuat budaya membaca yang tumbuh, kian terbuka pula peluang masyarakat memperkaya pengetahuan dan keterampilan mereka. Sayangnya, dibandingkan sejumlah negara lain, tingkat literasi maupun minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, sehingga optimalisasi peran perpustakaan sebagai pusat literasi dan sumber informasi menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditunda.

Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia pada dasarnya adalah rangkaian upaya meningkatkan kualitas manusia, baik lewat pendidikan, pelatihan, penguatan keterampilan, maupun perluasan akses terhadap informasi dan pengetahuan. Todaro dan Smith (2015) memaknainya sebagai proses meningkatkan kapasitas manusia melalui perbaikan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta akses atas berbagai sumber daya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka pembangunan daerah, peningkatan kualitas SDM kerap ditempatkan sebagai prioritas utama pemerintah, mengingat SDM yang mumpuni menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, pendorong produktivitas warga, sekaligus penguat daya saing daerah di tengah persaingan global.

Peran Perpustakaan dalam Pembangunan SDM dan Penelitian Terdahulu

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 2015) menggarisbawahi sejumlah peran penting perpustakaan dalam pembangunan masyarakat, yakni sebagai pusat informasi, ruang belajar sepanjang hayat, sekaligus sarana pemberdayaan warga. Peran lain yang tak kalah penting adalah mendorong literasi

informasi—kesanggupan mencari, menilai, dan memanfaatkan informasi secara tepat—yang kian mendesak di era digital ketika masyarakat dibanjiri beragam sumber informasi yang belum tentu kredibel. Di samping itu, perpustakaan turut mengasah keterampilan warga lewat program pelatihan, seminar, lokakarya, maupun kegiatan edukatif lain, sehingga fungsinya melampaui sekadar tempat membaca dan menjelma menjadi pusat pembelajaran masyarakat yang lebih luas.

Kerangka teoretis di atas juga mendapat dukungan dari sejumlah kajian terdahulu. Lasa Hs (2016), misalnya, mendapati bahwa perpustakaan umum berkontribusi nyata dalam mengangkat literasi masyarakat melalui program penumbuhan minat baca dan penguatan layanan informasi. Rahmawati (2019) mencatat bahwa perpustakaan daerah mampu memperluas akses warga terhadap informasi sekaligus menopang kegiatan belajar masyarakat, sedangkan Putra (2021) menyimpulkan bahwa program literasi yang digagas perpustakaan daerah efektif mendongkrak minat baca dan memperkaya wawasan publik. Bertolak dari kajian teori dan riset-riset terdahulu tersebut, penelitian ini menyusun kerangka pemikiran yang menyoroti peran perpustakaan daerah dari empat sisi utama—layanan informasi, program literasi, akses terhadap sumber pengetahuan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat—yang secara bersama-sama diharapkan turut mengangkat literasi, pengetahuan, dan keterampilan warga Kota Banjarmasin.

2. METODE PENELITIAN

Guna menyelami secara mendalam peran Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin dalam menopang pembangunan sumber daya manusia, penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif. Lokasi penelitian berpusat di Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin, dengan informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling—mencakup Kepala Perpustakaan Daerah, pustakawan/pengelola perpustakaan, pengunjung/pengguna layanan, serta masyarakat yang pernah mengikuti program literasi.

Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam (in-depth interview), baik dalam format terstruktur maupun semi-terstruktur, serta pengamatan langsung atas aktivitas dan layanan perpustakaan. Sementara itu, data sekunder digali dari dokumen resmi, laporan kegiatan, dan data statistik pemanfaatan layanan perpustakaan. Proses analisis data ditempuh melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahap—reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan—dengan berpedoman pada empat aspek kerangka pemikiran penelitian: layanan informasi, program literasi, akses terhadap sumber pengetahuan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Tiga jalur ditempuh peneliti dalam mengumpulkan data. Pertama, observasi digunakan untuk menyaksikan langsung kondisi perpustakaan, fasilitas yang tersedia, hingga aktivitas layanan yang berjalan di lokasi, sehingga tergambar kondisi riil pelaksanaan layanan kepada warga. Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview)—baik terstruktur maupun semi-terstruktur—dilakukan terhadap seluruh informan untuk menggali informasi secara lebih rinci dan luwes seputar peran perpustakaan dalam pembangunan sumber daya manusia. Ketiga, dokumentasi ditempuh dengan menghimpun berbagai dokumen resmi, seperti laporan kegiatan, data statistik pengunjung, dan arsip program literasi yang relevan dengan fokus kajian.

Karakteristik Informan

Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap pihak memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung yang berkaitan erat dengan fokus penelitian. Kepala Perpustakaan Daerah dilibatkan untuk menggali kebijakan dan arah strategis pengelolaan perpustakaan; pustakawan/pengelola dilibatkan untuk memperoleh gambaran teknis pelaksanaan layanan sehari-hari; pengunjung/pengguna dilibatkan untuk menangkap perspektif langsung penerima layanan; sementara masyarakat peserta program literasi dilibatkan untuk mengungkap manfaat program dari sudut pandang peserta itu sendiri. Keragaman posisi informan ini memungkinkan diperolehnya data yang saling melengkapi dari berbagai sudut pandang.

Keabsahan Data

Guna menjamin keabsahannya, data dalam penelitian ini diuji melalui dua bentuk triangulasi, yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber ditempuh dengan menyandingkan keterangan dari Kepala Perpustakaan Daerah, pustakawan, pengunjung, dan peserta program literasi guna memastikan temuan antarinforman saling konsisten. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara terhadap temuan observasi lapangan dan dokumen resmi perpustakaan, sehingga validitas data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Lewat kedua teknik triangulasi tersebut, penelitian ini berupaya menekan bias subjektif sekaligus mengangkat kredibilitas temuan yang dihasilkan.

Tahapan Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada data mentah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus kajian. Selanjutnya, tahap penyajian data dilakukan dengan merangkai data yang telah direduksi ke dalam narasi deskriptif yang tersusun sistematis berdasarkan empat aspek kerangka pemikiran penelitian. Tahap terakhir,

penarikan kesimpulan, ditempuh dengan memaknai pola dari data yang telah disajikan, lalu dikonfirmasi ulang terhadap kondisi lapangan agar kesimpulan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan realitas di lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perpustakaan Daerah dalam Mendukung Pembangunan SDM

Temuan wawancara memperlihatkan pergeseran fungsi Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin, dari sekadar gudang koleksi bacaan menjadi pusat pembelajaran bagi warga. Arah kebijakan ini dijelaskan langsung oleh Kepala Perpustakaan Daerah berikut.

"Perpustakaan sekarang bukan hanya tempat membaca buku. Kami ingin menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar sepanjang hayat. Semua lapisan masyarakat bisa datang untuk memperoleh pengetahuan, mengikuti pelatihan, maupun mengembangkan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari." (Kepala Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin, hasil wawancara)

Dari sudut pandang penerima layanan, manfaat peran tersebut turut dirasakan pengunjung dalam menunjang aktivitas belajar dan penyelesaian tugas mereka.

"Saya sering datang untuk mengerjakan tugas karena suasananya tenang, internet tersedia, dan referensi buku cukup lengkap." (Pengunjung Perpustakaan)

Temuan ini menguatkan pandangan Sulistyobasuki (2010) yang menempatkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan wahana pembelajaran bagi beragam kalangan, sekaligus sejalan dengan IFLA (2015) yang memosisikan perpustakaan sebagai ruang belajar sepanjang hayat dan sarana pemberdayaan warga. Pernyataan Kepala Perpustakaan bahwa "ketika masyarakat memiliki akses informasi yang baik, kemampuan berpikir kritis juga akan meningkat sehingga kualitas SDM ikut berkembang" pun turut mengonfirmasi temuan Rahmawati (2019), yang menyebutkan bahwa keberadaan perpustakaan daerah mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus menopang aktivitas belajar warga.

Ditilik dari perspektif pembangunan sumber daya manusia menurut Todaro dan Smith (2015), terbukanya akses masyarakat terhadap informasi berkualitas menjadi salah satu syarat penting bagi peningkatan mutu pendidikan dan pengetahuan warga secara berkelanjutan. Peran Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin sebagai ruang belajar sepanjang hayat, sebagaimana tergambar dari temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa fungsinya kini melampaui sekadar penyedia bahan bacaan—ia menjelma ruang yang menopang penyelesaian tugas, pengasahan keterampilan, dan penguatan daya pikir kritis masyarakat. Hal ini selaras dengan dinamika

sosial-ekonomi Kota Banjarmasin yang terus bergerak maju, sehingga kebutuhan akan ruang belajar publik yang representatif menjadi kian mendesak.

Bentuk Layanan dan Program Literasi

Ragam layanan turut disediakan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin, mulai dari bentuk konvensional hingga digital.

"Kami menyediakan layanan baca di tempat, peminjaman koleksi, perpustakaan digital, ruang diskusi, internet gratis, serta berbagai kegiatan literasi seperti pelatihan literasi informasi, mendongeng untuk anak-anak, bedah buku, dan pelatihan keterampilan." (Kepala Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin, hasil wawancara)

Senada dengan itu, pustakawan menyebutkan bahwa pelatihan literasi digital dan kegiatan membaca untuk anak-anak menjadi program paling diminati warga, mencerminkan pergeseran kebutuhan pengunjung yang tidak lagi semata mencari koleksi cetak.

"Program literasi digital banyak diminati karena masyarakat ingin belajar menggunakan teknologi secara lebih bijak. Untuk anak-anak biasanya kegiatan mendongeng dan membaca bersama cukup ramai." (Pustakawan)

Manfaat dari program literasi ini pun dirasakan langsung oleh para peserta, terutama dalam mengasah kejelian memilah informasi yang kredibel.

"Saya mengikuti pelatihan literasi digital dan sangat terbantu memahami cara mencari informasi yang benar serta membedakan berita hoaks." (Peserta Program Literasi)

Temuan tersebut selaras dengan konsep literasi UNESCO (2017) yang menitikberatkan pada kesanggupan mengenali, memahami, dan mendayagunakan informasi secara efektif, sekaligus menguatkan hasil kajian Putra (2021) bahwa program literasi di perpustakaan daerah efektif mengangkat minat baca dan memperluas cakrawala masyarakat. Terus berkembangnya digitalisasi koleksi juga mencerminkan kesiapan perpustakaan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, sebagaimana diamanatkan Standar Nasional Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota (Perpustakaan Nasional RI, 2021).

Beragamnya layanan yang tersedia, dari yang konvensional hingga digital, mengindikasikan bahwa Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin berupaya menjawab pergeseran pola akses informasi masyarakat di era digital. Tingginya minat terhadap pelatihan literasi digital mencerminkan kebutuhan riil warga untuk mampu memilah informasi yang kredibel di tengah derasnya banjir informasi, sejalan dengan konsep literasi informasi UNESCO (2017). Di sisi lain, program mendongeng dan membaca bersama bagi anak-anak menegaskan peran perpustakaan dalam menanamkan kebiasaan membaca sejak dini—fondasi penting bagi tumbuhnya budaya literasi jangka panjang di tengah masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Sejumlah faktor turut menopang keberhasilan program perpustakaan, mulai dari komitmen pemerintah daerah, kompetensi pustakawan, hingga kemitraan dengan sekolah dan komunitas literasi.

"Dukungan pemerintah daerah cukup baik, terutama dalam penyediaan fasilitas dan pengembangan program literasi. Selain itu, kerja sama dengan sekolah dan komunitas juga membantu memperluas jangkauan pelayanan." (Kepala Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin, hasil wawancara)

Kendati begitu, sejumlah kendala masih mewarnai pelaksanaannya, baik menyangkut anggaran, sarana teknologi, maupun tingkat pengetahuan warga atas layanan yang tersedia.

"Kendala utama adalah masih terbatasnya jumlah komputer serta jaringan internet yang kadang kurang stabil ketika pengunjung sedang ramai." (Pustakawan)

"Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa perpustakaan sekarang memiliki banyak layanan selain membaca buku." (Pustakawan)

Kendala serupa turut disoroti peserta program literasi, khususnya menyangkut penyebaran informasi kegiatan.

"Kadang kami baru mengetahui kegiatan ketika sudah mendekati pelaksanaan sehingga tidak semua masyarakat dapat ikut." (Peserta Program Literasi)

Persoalan keterbatasan anggaran dan sarana teknologi ini beririsan dengan tantangan literasi nasional yang secara umum masih tertinggal dibanding negara lain, sebagaimana disinggung dalam kajian UNESCO (2017). Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa faktor sumber daya dan sosialisasi menjadi penentu keberhasilan sebuah program perpustakaan, sejalan dengan temuan Lasa Hs (2016) bahwa kontribusi perpustakaan umum terhadap literasi masyarakat sangat bergantung pada kualitas program penumbuhan minat baca dan layanan informasi yang dijalankan.

Kendala sarana teknologi dan anggaran yang terungkap dalam penelitian ini juga dijumpai pada banyak perpustakaan daerah lain di Indonesia, sebagaimana disinggung dalam Standar Nasional Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota (Perpustakaan Nasional RI, 2021) yang menegaskan pentingnya standar minimal sarana-prasarana sebagai prasyarat pelayanan optimal. Di sisi lain, minimnya sosialisasi layanan menandakan bahwa keberhasilan sebuah program publik tidak semata ditentukan oleh mutu program itu sendiri, melainkan juga seberapa jauh informasinya mampu menjangkau masyarakat sasaran. Dengan kata lain, strategi komunikasi publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mengoptimalkan peran perpustakaan daerah.

Strategi Peningkatan Peran Perpustakaan Daerah

Perluasan kemitraan dengan berbagai lembaga menjadi strategi utama yang ditempuh pengelola perpustakaan untuk memperkokoh fungsinya sebagai pusat pembelajaran masyarakat.

"Kami ingin lebih banyak bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga pelaku UMKM agar perpustakaan benar-benar menjadi pusat pembelajaran masyarakat." (Kepala Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin, hasil wawancara)

Pada tataran teknis, pustakawan memandang perlu adanya penambahan koleksi digital serta penguatan promosi lewat media sosial, sementara pengunjung mengusulkan pengembangan ruang publik yang lebih modern.

"Kalau ada lebih banyak ruang diskusi, seminar, pelatihan, dan coworking space pasti masyarakat akan semakin tertarik datang." (Pengunjung Perpustakaan)

Strategi-strategi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan pembaruan layanan, sebagaimana ditekankan Todaro dan Smith (2015) bahwa pembangunan sumber daya manusia menuntut perluasan akses terhadap sumber daya demi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Usulan perluasan kemitraan dan digitalisasi layanan dari informan pun sejalan dengan arah pengembangan perpustakaan umum modern yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era digital (Perpustakaan Nasional RI, 2021).

Usulan perluasan kemitraan dari para informan mencerminkan kesadaran bahwa optimalisasi peran perpustakaan daerah mustahil diwujudkan sendirian oleh pengelolanya, melainkan menuntut sinergi lintas sektor—baik dengan institusi pendidikan, pelaku usaha, maupun komunitas masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2015) bahwa pembangunan sumber daya manusia bersifat kolaboratif dan berkesinambungan. Sementara itu, gagasan pengembangan ruang publik yang lebih modern, seperti ruang diskusi dan coworking space, menandakan pergeseran fungsi perpustakaan dari ruang baca yang pasif menuju ruang belajar dan berkolaborasi yang aktif, sejalan dengan arah pengembangan perpustakaan modern berorientasi kebutuhan masyarakat di era digital (Perpustakaan Nasional RI, 2021).

Implikasi Teoritis dan Praktis

Dari sisi teoretis, temuan ini memperkokoh kerangka konseptual mengenai peran perpustakaan daerah sebagai ruang belajar sepanjang hayat dan sarana pemberdayaan masyarakat sebagaimana digagas IFLA (2015), sekaligus menghadirkan bukti empiris baru dari konteks kota di luar Pulau Jawa yang memiliki karakter sosial-geografis tersendiri. Dari sisi praktis, hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan pengelola Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin dalam menyusun kebijakan pengembangan layanan,

terutama menyangkut penguatan anggaran sarana teknologi, perluasan kemitraan lintas sektor, serta intensifikasi sosialisasi program lewat media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan dan informasi, tetapi juga menghadirkan rekomendasi yang aplikatif bagi pemangku kebijakan di tingkat daerah.

4. KESIMPULAN

Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin terbukti menjalankan peran strategis dalam menopang pembangunan sumber daya manusia, baik lewat penyediaan layanan informasi, pengembangan program literasi, pemanfaatan teknologi digital, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Layanan yang tersedia meliputi layanan baca di tempat, peminjaman koleksi, perpustakaan digital, serta program literasi seperti pelatihan literasi digital, kegiatan membaca untuk anak-anak, dan bedah buku—yang secara nyata mengasah kemampuan warga dalam mengakses sekaligus memilah informasi. Keberhasilan ini ditopang oleh dukungan pemerintah daerah, kompetensi pustakawan, dan kemitraan dengan sekolah maupun komunitas literasi, kendati masih dijumpai kendala berupa rendahnya minat baca sebagian warga, keterbatasan anggaran dan sarana teknologi, serta sosialisasi layanan yang belum optimal. Ke depan, penguatan peran perpustakaan diarahkan pada perluasan kemitraan lintas lembaga, pengayaan koleksi digital, serta promosi layanan yang lebih gencar lewat media sosial. Penelitian selanjutnya disarankan menelisik secara kuantitatif dampak program literasi terhadap peningkatan kompetensi masyarakat, serta memperluas cakupan kajian ke perpustakaan daerah lain guna memperkaya perbandingan strategi pengembangan literasi di Indonesia.

5. REFERENSI

- IFLA. (2015). Libraries, development and the United Nations 2030 agenda. IFLA.
- Lasa Hs. (2016). Manajemen perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi. Ombak.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage Publications.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2021). Standar nasional perpustakaan umum kabupaten/kota. Perpustakaan Nasional RI.
- Putra, A. (2021). Program literasi perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 9(1), 45–58.
- Rahmawati, D. (2019). Peran perpustakaan daerah dalam meningkatkan literasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 4(2), 85–96.
- Sulistyo-Basuki. (2010). Pengantar ilmu perpustakaan. Universitas Terbuka.
- Sutarno, N. S. (2012). Manajemen perpustakaan: Suatu pendekatan praktik. Sagung Seto.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development. Pearson Education.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- UNESCO. (2017). Literacy for sustainable development goals. UNESCO Publishing.